

## SKRIPSI

# PENERAPAN PRINSIP PEMBEADAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL (*CIVILIANS*) DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH

*Diajukan sebagai syarat untuk penulisan skripsi*

*pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

WAHYU PRIYANTO

1410112026

PROGRAM KEKHSUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing I : Dr. Mardenis, S.H., M.Si.

Pembimbing II : M. Jhon S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEADAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)  
DALAM PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL (*CIVILIANS*) DALAM  
KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH**

(Wahyu Priyanto, 1410112026, Hukum Internasional (PK VI) Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 70 halaman, 2018)

**ABSTRAK**

Perlindungan penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata sangat penting dilakukan terutama oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. salah satu cara untuk melindungi penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata yaitu dengan cara melaksanakan prinsip pembedaan. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 telah memakan banyak korban dari penduduk sipil. Prinsip pembedaan memiliki tujuan utama untuk melindungi warga sipil dengan cara membeda-bedakan atau membagi pihak mana yang boleh diserang dan pihak mana yang tidak boleh diserang. Penulis disini membahas tentang bagaimana pengaturan perlindungan warga sipil di dalam Hukum Humaniter Internasional dan penerapan prinsip pembedaan yang ditujukan untuk perlindungan warga sipil oleh pihak – pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Metoda penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan meneliti kepustakaan serta menggunakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti menggambarkan fakta yang tampak dengan norma sebenarnya. Kemudian penelitian ini mengedepankan data sekunder sebagai data utama dalam menyusun serta menganalisis permasalahan yang ada. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa; 1) Perlindungan warga sipil diatur di dalam banyak konvensi terutama Konvensi Jenewa IV di antara pasal 27 sampai dengan pasal 34. Prinsip Pembedaan juga mempunyai peran penting dalam perlindungan warga sipil karena berfungsi sebagai pemisah antara yang mana yang boleh diserang dan yang mana yang tidak boleh diserang; 2) Dalam konflik tersebut, pelaksanaan Prinsip Pembedaan yang dilakukan oleh pemerintahan presiden Bashar Al-Assad dan kelompok Oposisi tidak dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut mengakibatkan perlindungan warga sipil tidak terlaksana secara maksimal dan bencana kemanusiaan yang terjadi malah bertambah besar. Kelompok lain yang terlibat, seperti ISIS dan kelompok teroris lainnya, sama sekali tidak mengindahkan aturan yang terdapat didalam Hukum Humaniter Internasioal yang menyebabkan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Suriah semakin memprihatinkan. Maka dari itu sangat dibutuhkan kesadaran dari para pihak untuk secara bersama menghormati keberadaan penduduk sipil dan berusaha untuk melindungi serta menjunjung tinggi hak-hak mereka sehingga bencana kemanusiaan yang terjadi di Suriah tidak semakin besar.

Kata Kunci : Prinsip Pembedaan, Pelindungan Penduduk Sipil, Suriah.

**IMPLEMENTATION OF DISTINCTION PRINCIPLE IN CIVILIANS  
PROTECTION (CIVILIANS) IN ARMED CONFLICT IN SURIAH**

(Wahyu Priyanto, 1410112026, International Law (MP VI) Law Faculty of Andalas University, 70 pages, 2018)

### **Abstract**

The protection of the civilian population in an armed conflict is very important especially for those involved in the conflict. One way to protect the civilian population in an armed conflict is by implementing of distinction principle. The armed conflict that occurred in Syria that took place since 2011 has taken a lot of casualties from civilians. Distinction principle has the main objective to protect civilians by discriminating or dividing which parties may be attacked and which parties should not be attacked. The author here discusses how to regulate the protection of civilians in international humanitarian law and the implementation of the principle of differentiation aimed at the protection of civilians by the parties involved in the conflict. The research method used is Juridical-Normative by researching literature and using research on horizontal synchronization level which is defined as a problem-solving procedure that is examined describing facts that appear to the actual norms. This research put forward secondary data as the main data in compiling and analyzing existing problems. From the research conducted it is known that; 1) Protection of civilians is regulated in many conventions, especially Geneva Convention IV between articles 27 to 34. Distinction principle also has an important role in the protection of civilians because it functions as a separator between which is allowed to be attacked and which should not be attacked ; 2) In the conflict, the implementation of Distinction Principle made by the government of President Bashar Al-Assad and the Opposition group was not carried out optimally. This resulted in the protection of civilians not being carried out optimally and the humanitarian disaster that occurred was even greater. Other groups involved, such as ISIS and other terrorist groups, did not heed the rules contained in the International Humanitarian Law which caused humanitarian problems in Syria to become even more alarming. Therefore, it is very much needed awareness from the parties to jointly respect the existence of civilians and try to protect and uphold their rights so that the humanitarian disaster that occurs in Syria is not getting bigger.

Keywords: Distinction Principle, Civilians Protection, Syria